



**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI  
PERMASALAHAN BANJIR DI KOTA MALANG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum (Strata 1)**



Oleh

**Ayu Niken Agustin**

**21901021133**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

## RINGKASAN

### PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI

#### PERMASALAHAN BANJIR DI KOTA MALANG

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana banjir di Kota Malang ?. *Kedua*, Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Malang ?

Metode yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Yuridis – Empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, perbandingan, dan pendekatan kasus. Jenis data dan bahan hukum yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer, berupa ilmu pengetahuan, pemahaman, sikap, tindakan, persepsi, pengalaman, dan lain-lain yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Sedangkan data sekunder, diperoleh langsung dari sumber data yang diteliti melalui buku, artikel, jurnal, notulensi pembahasan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, doktrin, pendapat ahli, arsip, kwitansi, berkas perkara, perjanjian, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, pengamatan/observasi dan studi pustaka baik terstruktur maupun tidak struktur, serta terlibat dalam *Focus Group Discussion* (FGD). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier melalui akses internet, pusat dokumentasi dan informasi hukum atau perpustakaan instansi terkait.

Hasil penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana banjir Studi Kasus di Kota Malang menunjukkan bahwa pertumbuhan pembangunan yang massif tak hanya terjadi di wilayah integral Indonesia yang berada di wilayah dataran rendah saja, namun di wilayah dataran tinggi kali ini cukup menyita perhatian, karena kondisi geografisnya dianggap tidak memungkinkan untuk rawan bencana. Sudah tiga tahun terakhir ini, masyarakat Kota Malang dikejutkan dengan adanya peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu genangan air yang mengepung hampir seluruh sudut Kota Malang. Terdapat beberapa titik genangan yang dianggap membahayakan kondisi wilayah Kota Malang, dimana kedalaman lubang genangan mencapai 2 meter. Inilah kondisi yang disebut banjir. Dengan kondisi masyarakat Kota Malang yang memprihatinkan tersebut, pemerintah Kota Malang dalam hal ini telah mencanangkan program-program guna mengatasi bencana banjir tersebut. Dengan kondisi banjir yang menahun tersebut, pemerintah Kota Malang melakukan pembangunan drainase baru dan berkelanjutan, untuuk merawat yang sudah ada. Pada tahun ini, pemerintah Kota Malang membuat perencanaan anggaran terkait “masterplan drainase” melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan melakukan kerjasama bersama Fakultas Teknik Universitas Brawijaya untuk membuat peta drainase. Pengadaan drainase ini dikareakan terdapat temuan beberapa jalur drainase yang tidak berfungsi. Upaya pemerintah Kota Malang tersebut merupakan realisasi dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menunjang “Gerakan 100-0-100” berdasar pada Peraturan Menteri Pekerjaan



Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kawasan Kumuh dan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 40 Tahun 2016, dimana program tersebut tertuju untuk penanganan revitalisasi infrastruktur yang ada di area permukiman rawan di Kota Malang. Selain itu terdapat beberapa program yang telah dicanangkan guna penanggulangan bencana banjir yang telah menahun tersebut melalui “Proyek Mitigasi Bencana”, dimana terdapat beberapa persoalan terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penataan Ruang yang menjadi salah satu faktor terjadinya bencana banjir berulang. Namun, program-program tersebut masih luput dari sempurna, banjir masih kerap terjadi dan masih banyak menimbulkan dampak yang lebih parah mengancam kehidupan warga Kota Malang.

**Kata Kunci:** Pemerintah, Penanggulangan, Bencana Banjir.



## SUMMARY

### THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN OVERCOMING FLOOD

#### PROBLEMS IN MALANG CITY

*In this thesis, the author raises the problem with the following problem formulation: First, what are the factors that led to the occurrence of floods in the city of Malang?. Second, what is the role of the Regional Government in tackling the flood disaster in Malang City?*

*The method used by the author uses the Juridical - Empirical method by using statutory approaches, conceptual approaches, comparisons, and case approaches. The types of data and legal materials used are primary data and secondary data. In primary data, the form of knowledge, understanding, attitudes, actions, perceptions, experiences, and others obtained directly from research subjects. While secondary data, obtained directly from data sources studied through books, articles, journals, minutes of discussion of laws and regulations, academic texts, doctrines, expert opinions, archives, receipts, case files, agreements, and others. Data collection techniques obtained through interviews, documentation, observation/observation and literature study both structured and unstructured, as well as being involved in Focus Group Discussions (FGD). Collection of legal materials is carried out using primary, secondary and tertiary data through internet access, legal documentation and information centers or libraries of related institutions.*

*The results of research on the role of local government in efforts to deal with floods. The Case Study in Malang City shows that massive development growth is not only occurring in integral areas of Indonesia which are in the lowlands, but in the highlands this time it is quite a concern, because of the conditions geographically considered not possible to be prone to disasters. For the past three years, the people of Malang City have been shocked by an incident that has never happened before, namely a pool of water that surrounds almost all corners of Malang City. There are several inundation points that are considered dangerous for the condition of the Malang City area, where the depth of the inundation holes reaches 2 meters. This condition is called a flood. With the apprehensive condition of the people of Malang City, the government of Malang City in this case has launched programs to deal with the flood disaster. With the chronic flood conditions, the government of Malang City has built a new and sustainable drainage to maintain the existing one. This year, the government of Malang City is preparing a budget plan related to the "drainage master plan" through the Office of Public Works and Spatial Planning (PUPR) by collaborating with the Faculty of Engineering, University of Brawijaya to make a drainage map. Procurement of this drainage because there are findings of several drainage lines that are not functioning. The Malang City government's efforts are a realization of the City Without Slums (KOTAKU) program in supporting the "100-0-100 Movement" based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) Number 2 of 2016 Concerning the Improvement of Slum Areas and Circular of the Director General of Human Settlement Work Number 40 of 2016, where*



*the program is aimed at handling the revitalization of existing infrastructure in vulnerable residential areas in Malang City. In addition, there are several programs that have been launched to deal with the chronic flood disaster through the "Disaster Mitigation Project", where there are several problems related to Green Open Space (RTH) and Spatial Planning which are one of the factors in the occurrence of repeated flood disasters. However, these programs are still not perfect, floods still occur frequently and still have a more severe impact on the lives of Malang City residents.*

**Keywords:** *Government, Mitigation, Flood Disaster*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) dan merupakan negara kepulauan berada di khatulistiwa letaknya persis berada diantara Benua Australia dan Benua Asia, serta letaknya di antara Samudra Hindia dan Pasifik menjadikan Indonesia berada di pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik posisi utama di dunia. Yang mana letak geografis tersebut merupakan wilayah rawan akan bencana alam. Menyandang predikat “Zamrud Khatulistiwa” tentunya bukanlah hal mudah bagi Indonesia selain dalam menjaga Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, juga menjaga Sumber Daya Manusia (SDM) di negara tersebut.

Dalam hal ini, negara berperan dalam mengelola kestabilan antara Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang hidup di dalamnya agar tidak terjadi ketimpangan. Kewajiban tersebut di emban oleh pemerintah sebagai wujud tangan negara. Sadar akan potensi bencana, Indonesia harus sigap dalamantisipasi bencana dengan tanggap darurat, mitigasi bencana, serta rekonstruksi rehabilitasi. Tanggungjawab ini di emban oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mana lembaga ini dibentuk berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Penanggulangan Bencana yang merupakan realisasi dari Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.<sup>1</sup> Potensi bencana

---

<sup>1</sup> Lihat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Penanggulangan Bencana

yang ada telah disoroti oleh United Nations International Strategy For Disaster Redustion (UNISDR) sejak penelitian dari tahun 1977-2009. Indonesia berada pada posisi ke-9 (kesembilan) sebagai negara dengan potensi bencana paling beresiko tinggi.

2

Sebagai negara yang menyandang predikat negara berkembang (*welfare state*), tentunya Indonesia patut mewaspadaai bencana yang akan datang secara tiba-tiba atau tidak dapat diperkirakan. Pertimbangan yang perlu diperhatikan ialah bagaimana tingkat kemampuan sebuah negara alam menghadapi bencana tersebut. Partisipasi antara pemerintah dan rakyat dalam menanggulangi bencana harus digalakkan. Dimana stabilisasi SDM dan SDA tak lain dilakukan dengan tujuan kesejahteraan serta keamanan negara. Pembangunan yang berkelanjutan tidak harus mengesampingkan fondasi-fondasi serta aspek-aspek ekologi yang harus di lestarikan agar pembangunan tersebut menjadi pembangunan yang berwawasan dan penuh pertimbangan kebangsaan. Artinya, hal-hal yang perlu untuk dapat dipertimbangkan ialah aspek *deforestasi* sebagai dampak dari adanya eksploitasi ekologi tersebut.

Penanggulangan bencana alam merupakan aspek integral dari pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menjadi tanggungjawab setiap organ yang berada di dalam tubuh sebuah negara, baik masyarakat maupun pemerintah yang notabene keduanya menyandang predikat sama-sama sebagai warga negara. Masyarakat dan pemerintah harus bahu-membahu atau bergotong royong dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam. Karena, potensi bencana yang tinggi, dapat memberikan impact besar

---

<sup>2</sup> Kodoatie dan Sjarief, *Pengelolaan Bencana Terpadu*. Nuansa Aulia, (Bandung, 2009), hlm. 8

dan menghambat laju perkembangan pembangunan sebuah negara. Namun, seringkali penanggulangan bencana masih dianggap parsial oleh negara, hanya sebatas tanggapan darurat saja. Kurang tanggapnya bencana merupakan akibat yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi integral antar organ yang ada di dalam sebuah negara. Sebagai warga negara, berkaitan tentang hak dan tanggungjawab menjadi pilar keseimbangan proses kehidupan bermasyarakat. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26-34,<sup>3</sup> bahwa warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak serta perlindungan di mata hukum. Kemudian, perihal kewajiban yang di emban, artinya menjaga lingkungan hidup untuk kehidupan yang layak tersebut merupakan semua elemen yang ada di sebuah negara tanpa terkecuali.

Merujuk pada sebuah aksi *Sustainable Consumption and Production (SCP)* yang di sepakati dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20), pada bulan Juni 2012 lalu, bahwa kondisi bumi dengan penghuni kurang-lebih 7,2 milyar jiwa, membutuhkan sumberdaya alam yang besar untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia. Dalam menunjang kebutuhan pokok melalui proses produksi-konsumsi. Kebutuhan tersebut menimbulkan tekanan pada sumber daya alam yang ada, selain itu berpengaruh pada keberlanjutan serta kelangsungan hidup sumberdaya alam yang ada.<sup>4</sup> Krisis lingkungan yang di hadapi merupakan imbas dari proses eksploitasi. Salah satunya ialah, permasalahan banjir yang merupakan salah satu isu yang menyita cukup

---

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> Dr. Moh Fadli, Muklish, Lutfi, "*Hukum & Kebijakan Lingkungan*". (Malang: UB Press, 2016), hlm.



perhatian di Indonesia hingga paada saat ini. Permasalahan tersebut akibat karena kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Dimana pemerintah pusat (BNPB) mengalami kendala dalam hal kordinasi dengan pemerintaah daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pada umumnya terdapat solusi yang tepat agar masyarakat ikut terlibat dalam penanggulangan bencana, dengan melakukan pembangunan bendungan aatau baangunan anti banjir. Tapi, pada kenyataannya solusi tersebutmasih tidak cukup untuk mengendalikan dampak dari banjir. Terdapat solusi lainnya yang dapat menjangir masyarakat agar berpartisipasi penuh dalam penanggulangan, melalui pemberian informasi kepada masyarakat akan peta resiko banjir yang terbaru dan akurat.<sup>5</sup>

Permasalahan banjir dapat terpicu oleh rusaknya kawasan hutan daerah hulu yang kemudian membawa air tanah yang berlebih ke kawasan dengan hilir yang rendah. Kurangnya resapan air di hutan kota dan kurangnya perencanaan yang baik oleh pemerintah dalam penataan sungai dapat berimplikasi pada banjir.<sup>6</sup>

Pertumbuhan pembangunan yang massif tak hanya terjadi di wilayah integral Indonesia yang berada di wilayah dataran rendah saja, namun di wilayah dataran tinggi kali ini cukup menyita perhatian, karena kondisi geografisnya dianggap tidak memungkinkan untuk rawan bencana. Pada akhir tahun 2021 lalu, masyarakat Kota

---

<sup>5</sup> Hanie dan Meidina Zulfa. Analisis Mitigasi Banjir Di Daerah Aliran Sungai Babura Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016). hlm. 23

<sup>6</sup> Muhibbin, Mohammad, Umar Said Sugiharto, Budi Parmono. "*Partisipasi Masyarakat Kota Malang Dalam Pencegahan Bencana Banjir*". Negara dan Keadilan. (Malang: UNISMA, 2020) Vol. 9(2), hlm. 2-4.

Malang dikejutkan dengan adanya peristiwa yang belum pernah terjadi di Kota Dingin ini. Genangan air yang mengepung hampir seluruh sudut Kota Malang.<sup>7</sup> Terdapat beberapa titik genangan yang dianggap membahayakan kondisi wilayah Kota Malang, dimana kedalaman lubang genangan mencapai 2 meter.<sup>8</sup> Inilah kondisi yang disebut banjir. Hampir setiap kali musim penghujan, Kota Malang terlihat rawan akan genangan-genangan yang terletak diberbagai sudut sepanjang jalan di Kota Malang. Genangan dengan lubang yang dalam tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat, tak hanya sampai disitu. Sebagai pengguna jalan raya, tentunya genangan sangat memberikan kerugian sosial bagi masyarakat Kota Malang. Selain itu kerugian sosial lainnya ialah, adanya genangan air dapat memicu semakin memburuknya kerusakan infrastruktur jalan. Ketika infrastruktur semakin rusak, maka akan menambah kerugian lainnya, seperti potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas atau contoh kecil lainnya ialah kebocoran ban kendaraan bermotor.

Dari tahun ke tahun, warga Kota Malang merasa risau akan dampak genangan yang semakin meluas hingga berpotensi banjir. Karena dapat mempengaruhi aktifitas sehari-hari warga setempat. Terlebih, pada masyarakat dengan kondisi sosial menengah kebawah yang terpaksa harus bermukim di Daerah Aliran Sungai (DAS). Di musim penghujan mereka akan merasa was-was dengan kondisi lingkungan mereka

---

<sup>7</sup> Avirista Midaada, (2021). "Banjir Terjang Kota Malang usai Diguyur Hujan Deras 3 Jam Lebih" <https://jatim.inews.id/berita/banjir-terjang-kotamalang-usai-diguyur-hujan-deras-3-jam-lebih> (diakses pada 22 Oktober 2022)

<sup>8</sup> Rifky Edgar, (2022). "Banjir di Malang, Anggi Bersama Istri dan Anak Terpaksa Bertahan 3 Jam di Atas Kanopi" <https://www.tribunnews.com/regional/2022/03/15/banjir-dimalang-anggi-bersama-istri-dan-anak-terpaksa-bertahan-3-jam-diatas-kanopi> (diakses pada 22 Oktober 2022)

yang berada tepat di bantaran aliran sungai. Permukiman Kumuh inilah yang sangat beresiko tertimpa dampak curah hujan tinggi.

Dengan kondisi masyarakat Kota Malang yang memprihatinkan tersebut, pemerintah Kota Malang dalam hal ini tidak berdiam diri saja, namun pemerintah dalam hal ini telah mencanangkan program-program guna mengatasi bencana banjir tersebut. Dengan kondisi banjir yang menahun tersebut, pemerintah Kota Malang melakukan pembangunan drainase baru dan berkelanjutan, untuuk merawat yang sudah ada.<sup>9</sup> Pada tahun ini, pemerintah Kota Malang membuat perencanaan anggaran terkait “masterplan drainase” sebesar Rp. 2,5 Miliar. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan melakukan kerjasama bersama Fakultas Teknik Universitas Brawijaya untuk membuat peta drainase.<sup>10</sup> Pengadaan drainase ini dikareakan terdapat temuan sepanjang 287 Km jalur yang tidak berfungsi.<sup>11</sup> Upaya pemerintah Kota Malang tersebut merupakan realisasi dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menunjang “Gerakan 100-0-100” berdasar pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kawasan Kumuh dan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor

---

<sup>9</sup> New Malang Pos,. (2021). “Urgen Normalisasi Drainase di Kota Malang”

<https://newmalangpos.id/urgan-normalisasi-drainase-di-kota-malang>

(diakses pada 22 Oktober 2022)

<sup>10</sup> Radar Malang,. (2021). “Banjir Menahun, Pemkot Malang Baru Bikin Masterplan Penanganan 2022” <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raja/kotamalang/04/11/2021/banjir-menahun-pemkot-malang-baru-bikin-masterplan-penanganan-2022/>

(diakses pada 22 Oktober 2022)

<sup>11</sup> Radar Malang,. (2022). “Pantesan Kota Malang Sering Banjir! Ada 287 Km Saluran Drainase Tak Fungsi” <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raja/kotamalang/26/02/2022/pantesan-kota-malang-sering-banjir-ada-287- km-saluran-drainase-tak-fungsi/>

(diakses pada 22 Oktober 2022)

40 Tahun 2016,<sup>12</sup> dimana program tersebut tertuju untuk penanganan revitalisasi infrastruktur yang ada di area permukiman rawan di Kota Malang. Namun, program-program tersebut masih luput dari sempurna, banjir masih kerap terjadi dan masih banyak menimbulkan dampak yang lebih parah mengancam kehidupan warga Kota Malang.

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan penulisan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana banjir di Kota Malang ?
2. Bagaimana peran dan upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Malang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya bencana banjir yang menahun di Kota Malang
2. Untuk mengetahui peran dan upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir di Kota Malang

---

<sup>12</sup> KOTAKU,. (2022). “Tentang Program Tanpa Kumuh”. [KOTAKU | Kota Tanpa Kumuh \(pu.go.id\)](https://www.kotaku.go.id) (diakses pada 22 Oktober 2022)

#### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan bagi pembaca, yaitu pemerintah dan masyarakat terkait penanggulangan bencana banjir berdasar pada dukungan program-program pemerintah yang dicanangkan
- b. Diharapkan dapat meberikan wawasan berkelanjutan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, terutama pada permasalahan bencana banjir di wilayah lainnya

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis berharap, dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tersendiri guna lebih baik lagi dalam melakukan penelitian kedepannya

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan, dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat terkait betapa pentingnya penanggulangan bencana banjir yang dapat memberikan resiko tinggi bagi masyarakat itu sendiri

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penulisan penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Permasalahan Banjir di Kota Malang”**. Penulis telah mempelajari beberapa lisensi terkait Permasalahan Banjir di Indonesia. Sehingga penelitian ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, di dapati

beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang telah dilakukan. Persamaan dan perbedaan tersebut diantaranya sebagai berikut :

No.	PROFIL	JUDUL
1	ANDI MUH. AZZAM RAIHAN RAMADHANI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR	MITIGASI BENCANA BANJIR GENANGAN DALAM KAWASAN PERKAMBANGAN PERMUKIMAN DI KELURAHAN BERUA, KOTA MAKASSAR
<b>RUMUSAN MASALAH</b>		
1) Bagaimana kondisi genangan dan bencana banjir berdasarkan faktor penyebab terjadinya banjir ? 2) Bagaimana kondisi aliran air di ruang pembukaan dan saluran drainase ? 3) Bagaimana arah mitigasi banjir pada permukiman dan perumahan ?		
<b>INTI PENELITIAN</b>		
1) Mengidentifikasi kondisi bencana banjir berdasarkan pada faktor penyebab terjadinya banjir di Kelurahan Berua. Faktor tersebut akibat dari resapan air atau sistem drainase yang kurang lancar, serta tidak mampu menampung kapasitas air akibat curah hujan. Diketahui		



	<p>debit permukaan air 38,81 m<sup>3</sup>/detik. Kemudian, terdapat sebanyak 25 saluran drainase melebihi daya tampung saluran.</p> <p>2) Mengidentifikasi arahan mitigasi bencana pada permukiman dan perumahan di Kelurahan Berua. Dimana arahan mitigasi bencana dibagi menjadi mitigasi secara struktural (perbaikan drainase, <i>floodway</i>, pembuatan sumur sebagai resapan, penggunaan konsep), seta non-struktural (membuat badan rawan bencana dan pemaerlakuan titik rawan bencana dengan rambu-rambu).</p>	
	<b>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</b>	
	<p><b>PERSAMAAN</b> yaitu sama sama membahas perihal banjir</p> <p><b>PERBEDAAN</b> terletak pada lokasi penelitian dan tinjauan terletak pada perencanaan struktural mitigasi bencana banjir yang terjadi di Berua</p>	
No.	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
2	ARIS DIAN RAHMADI  UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH MALANG	RESILIENSI MASYARAKAT  YANG BERMUKIM DI  DAERAH RAWAN BANJIR
	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	

1) Bagaimana gambaran resiliensi pada masyarakat kampung Glitung RW. 05 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ?	
<b>INTI PENELITIAN</b>	
1) Warga yang bermukim di area rawan banjir memiliki resiliensi cukup tinggi	
2) Terdapat perbedaan jenis kelamin, usia yang tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan hasil demografi. Dimana laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Usia menunjukkan 17-29 tahun memiliki tingkat resiliensi lebih rendah dibandingkan kelompok usia 30-40 tahun.	
<b>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</b>	
<b>PERSAMAAN</b> yaitu membahas tentang banjir di Kota Malang	
<b>PERBEDAAN</b> berfokus kepada resiliensi penduduk yang bermukim di permukiman rawan Banjir	
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>
3	GUNAWAN PRATAMA  UNIVERSITAS BENGKULU
	<b>JUDUL</b>
	ANALISIS  PENANGGULANGAN  BENCANA BANJIR OLEH  BADAN PENANGGULANGAN





	BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BENGKULU
<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
1) Bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap banjir di Kota Bengkulu ?	
<b>INTI PENELITIAN</b>	
1) Penanggulangan bencana banjir di daerah Kota Bengkulu belum berjalan dengan maksimal. Ditandai dengan pencegahan banjir, penanganan darurat banjir, rehabilitasi serta rekonstruksi banjir masih mengalami kendala. Kendala tersebut seperti tidak adanya peta rawan bencana, belum adanya pemantauan secara rutin karena belum adanya pelatihan kesigapan. Pada aspek darurat bencana banjir masih terlihat personil tidak turun membantu masyarakat saat terjadinya bencana banjir, fperalatan, fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai. Selain itu pada aspek rehabilitasi dan rekonstruksi terlihat tidak maksimal karena kurangnya koordinasi pemerintah daerah dan pusat. Akibatnya tidak menunjang sigap darurat apabila sewaktu-waktu terjadi banjir.	
<b>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</b>	



	<b>PERSAMAAN</b> yaitu sama-sama membahas tentang permasalahan banjir di Indonesia	
	<b>PERBEDAAN</b> terletak pada lokasi penelitian dan terfokus pada segi HAM berupa aspek psikologis masyarakat terdampak	
No.	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
4	AINUN ANAS  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	STUDI PERENCANAAN PENGENDALIAN BANJIR PADA HILIR SUNGAI SOMBE LEWARA (STUDI KASUS)
	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
	1) Bagaimana model simulasi tinggi pada muka air di sungai ? 2) Bagaimana simulasi pada pola arah aliran sungai ?	
	<b>★ INTI PENELITIAN ★</b>	
	1) Simulasi kedalaman pada debit air menunjukkan tinggi muka air Sungai Sombe Lewara menggunakan perbandingan antara program software dan manual, yang menghasilkan, software MAB 3-4 meter, sedangkan manual MAB 3.42 meter dari dasar sungai. 2) Sungai Sombe Lewara menunjukkan pola aliran dendritic yang merupakan percabangan batang pohon. Percabangan yang tidak	



	teratur memiliki pola arah beragam dan terhalang belokan yang mengakibatkan erosi pada tepi sungai yang memicu banjir.
	<b>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</b>
<b>PERSAMAAN</b>	yaitu sama-sama membahas tentang permasalahan banjir di Indonesia.
<b>PERBEDAAN</b>	terletak pada lokasi penelitian dan terfokus pada segi teknik pengairan sungai yang memicu banjir.

Sedangkan pada penelitian ini yaitu :

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
AYU NIKEN AGUSTIN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN BANJIR DI KOTA MALANG
<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana banjir di Kota Malang ?  2) Bagaimana peran dan upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Malang ?	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	

Pada Skripsi ini, peneliti lebih fokus membahas tentang status peran serta pemerintah pada program-program yang dijadikan upaya strategis penanggulangan Bencana Banjir yang terjadi di Kota Malang.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah empiris, yaitu merujuk pada data-data lapangan sebagai sumber data utama. Data lapangan yang disajikan ialah data observasi dan wawancara, serta dokumentasi. Penelitian empiris ditujukan guna analisis hukum yang terlihat sebagai perilaku nyata warga negara dalam pola kehidupan bermasyarakat (kehidupan bernegara), dimana interaksi antar warga negara yang saling terkait antara satu sama lainnya

Penelitian dilakukan di Kota Malang berdasar dengan alasan kasus yang sedang diteliti oleh penulis terkait penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Malang. Studi kasus tersebut berdasar pada pengalaman peneliti selama menjadi relawan, sehingga memudahkan peneliti dalam menunjang terselesaikannya skripsi ini.

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

#### 1. Data Primer

Data diperoleh secara langsung melalui sumber utama yaitu interaksi warga negara. Masyarakat terdampak, Pemerintah Kota Malang dan Non-Governmental Organization (NGO) merupakan sumber utama dalam penelitian

ini. Selain itu sebagai acuan kepustakaan peneliti menggunakan beberapa acuan kerangka pikir dalam analisis berupa :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945)
- b. Pancasila
- c. Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Undang-Undang Hukum Pidana
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Pemerintah
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- l. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- m. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Kota

- o. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Malang
- p. Peraturan Daerah Kota Malang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Nomor 56.I/BA-200.13.PB.01/XII/2021
- q. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kepustakaan sebagai acuan lain bahan analisis hukum. Berupa, buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan Data yang digunakan sebagai bahan yang di olah sebagai berikut :

### a. Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan alat yang digunakan sebagai pengumpulan data, pengamatan dilakukan dengan mengamati serta mencatat secara sistematis objek yang diteliti.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan jalur yang digunakan secara langsung dengan melakukan sesi dialog kepada responden. Jenis wawancara yang digunakan ialah bebas terstruktur dengan panduan pertanyaan yang bertujuan mengendalikan proses wawancara tanpa keluar dari konteks penelitian.

### c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan melakukan pengambilan dokumen sebagai catatan formal validasi terhadap objek yang diteliti sebagai bukti otentik penelitian.

### 3. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan sebagai kerangka acuan agar lebih tersistematis diantaranya dengan cara sebagai berikut :

#### 1. *Editing*

Pada tahap pertama, melakukan penelitian kembali pada data-data yang telah diperoleh. Meneliti dari segi kelengkapan, kejelasan, sesuatu, keteraturan serta relevansinya antar data satu dengan lainnya. Guna mencukupi untuk dapat diverifikasi pada tahap selanjutnya serta sebagai penguat penelitian.

#### 2. *Classifying*

Mereduksi kembali data yang ada dengan cara klasifikasi terhadap data yang ada dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk kemudahan dalam proses membaca kebutuhan penelitian.

#### 3. *Verifying*

Verifikasi terhadap data, atau pembuktian data tersebut terjamin keasliannya dan valid. Artinya mencocokkan antara data dengan perolehan wawancara yang telah dilakukan (korelasi).

#### 4. *Analyzing*

Menyederhanakan data agar mudah dicerna, yaitu dengan cara memaparkan data kemudian diinterpretasikan dengan sumber data sambil melakukan analisis terhadap data yang sedang dikaji. Selanjutnya, menuangkannya kedalam laporan hasil penelitian secara deskriptif kualitatif.

#### 5. *Concluding*

Pada tahapan akhir, pengolahan data dengan memaparkan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisis terhadap data untuk memperoleh jawaban atas masalah yang sedang diteliti.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar lebih sistematis maka penulis membagi menjadi empat bagian dalam penulisan skripsi ini :

1. BAB I (PENDAHULUAN) : Pada bab I berisi tentang latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II (TINJAUAN PUSTAKA) : Pada bab II ini akan membahas tentang peraturan pemerintah beserta program,-program pemerintah sebagai kerangka acuan yang digunakan sebagai upaya penanggulangan banjir di Indonesia.
3. BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN) : Pada bab III ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap bencana banjir yang terjadi di Kota Malang.
4. BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN) : Pada bab IV ini penulis akan menuliskan kesimpulan dan saran dari semua pembahasan yang sudah dipaparkan.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dalam melihat permasalahan banjir yang terjadi secara simultan di Kota Malang, banyak sekali faktor yang menunjukkan keterlibatan peran pemerintah sebagai penyebabnya. Mulai dari perspektif keberlanjutan ekologis yang tidak terlihat, hingga indikasi-indikasi kecurangan berupa korupsi pada persoalan anggaran pembangunan dalam proyek mitigasi yang masih sangat mungkin terjadi. Yang jelas, akibatnya adalah semakin banyaknya masyarakat dan lingkungan yang menjadi korban.
2. Pemerintah Kota Malang dalam upaya penanggulangan bencana banjir minimal harus mengingat visi pembangunan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu *“Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera”*. Dengan mengambil kebijakan yang tidak tepat guna dan asal-asalan, akan mengantarkan masyarakat dan lingkungan di Kota Malang menuju jurang kehancurannya.

#### B. Saran

Berdasarkan seluruh muatan penelitian diatas, peneliti memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Malang sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang harus dan wajib hukumnya mengevaluasi implementasi kebijakan tata ruang secara komprehensif melalui pemetaan tata ruang terhadap sejumlah proyek yang dibangun secara tak beraturan.

Selain itu, Pemerintah Kota Malang secara mendesak harus segera menertibkan proyek-proyek tersebut guna mencegah ekspansi proyek infrastruktur yang semakin mempersempit ruang terbuka hijau, daerah resapan dan wilayah sempadan sungai sebagaimana yang marak terjadi. Hal ini penting untuk meminimalisir problem banjir yang akhir-akhir ini semakin mengancam kehidupan masyarakat Kota Malang.

2. Pemerintah dan DPRD Kota Malang segera melakukan perlindungan ruang yang belum dialihfungsikan, seperti kawasan sempadan dan ruang hijau seperti kawasan persawahan atau ruang terbuka lainnya dalam sebuah regulasi. Penting juga pemerintah Kota Malang untuk melakukan rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau yang telah dialihfungsikan dengan merencanakan penataan ruang jangka panjang, seperti tidak memperpanjang izin unit usaha yang berada di Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah Kota Malang harus menghentikan ekspansi ruang melalui moratorium izin pada unit-unit usaha yang akan membangun di kawasan Ruang Terbuka Hijau atau ruang-ruang tersisa.
3. Selain itu dalam setiap pembuatan kebijakan dan regulasi terkait tata ruang di Kota Malang, wajib hukumnya pemerintah Kota Malang melibatkan seluruh warga kotanya dan elemen-elemen masyarakat sipil, agar ke depan kebijakan dan regulasi lebih inklusif atau sesuai dengan realitas kehidupan sehari-hari warga kota.
4. Bahwa salah satu faktor penyebab yang turut menyokong intensitas serta perluasan daerah banjir Kota Malang adalah proyek drainase yang tidak

maksimal, atau sering bermasalah dan berpotensi koruptif. Di mana, proyek drainase yang setiap tahun dianggarkan dan dilaksanakan Menggugat Permasalahan Banjir di Kota Malang 44 sama sekali tidak menjawab problem banjir. Bahkan, genangan air dimana-mana setiap kali hujan mengguyur. Padahal, anggaran proyek drainase tidak sedikit. Bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, kami mendesak kepada Walikota dan DPRD untuk segera mengevaluasi seluruh pekerjaan proyek drainase yang ada.

5. Mendorong kepada DPRD Kota Malang untuk melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mengevaluasi implementasi kebijakan tata ruang, pembangunan infrastruktur tidak berdasarkan fungsi dan peruntukan ruang, pelaksanaan anggaran proyek drainase yang belum sama sekali mencegah persoalan banjir, serta melakukan penyidikan dan memberikan sanksi terhadap para pihak yang diduga membangkang terhadap aturan tata ruang.
6. Menyarankan kepada Pemerintah dan DPRD segera membuka seluruh informasi terkait proses perubahan Peraturan Daerah tata ruang dan wilayah yang sedang berlangsung. Selain itu, pemerintah dan DPRD juga harus segera melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses revisi sebagai prasyarat demokrasi yang tidak bisa disepelekan. Sebaliknya jika tidak, patut dicurigai bahwa pemerintah dan DPRD bersepakat untuk mengkhianati masyarakat, serta revisi tersebut semata-mata untuk mengakomodir kepentingan politik-bisnis segelintir penguasa, baik pusat maupun daerah Kota Malang itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal :

- Alatas, S. H., & Al Ghozie (Usman.). (1982). Sosiologi korupsi: Sebuah penjelajahan dengan data kontemporer. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Aliansi Selamatkan Malang Raya, “Catatan Kritis: Revisi Perda RTRW Kota Batu Memicu Kerentanan Ruang Hidup”, Intrans Publising. November 2021
- Alwi, Hasan, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bakornas PB, 2006. Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia, Sat Bakornas PBP, Jakarta
- Burkitt, I. (2004). The time and space of everyday life. *Cultural studies*, 18(2-3)
- Deni Hidayati, 2005. Panduan Siaga Berbasis Masyarakat. LIPI Press, Jakarta.
- Dominey-Howes, D. (2018). Hazards and disasters in the Anthropocene: some critical reflections for the future. *Geoscience Letters*, 5(1), 1-15.
- Faisal, 1990. Strategi dan Operasional penanggulangan. Penerbit Liberty, Jakarta.
- Gottschalk, Louis, 1986. Mengerti Sejarah (terjemahan Nugroho Notosusanto). UI-Press, Jakarta.
- Gilbert, A. (2007), ‘The return of the slum: Does language matter?’, *International Journal of Urban and Regional Research* 31: 4: pg 697-713
- Hall, D., P. Hirsch and T. Murray Li. 2011. Powers of exclusion: land dilemmas in Southeast Asia. Singapore: National University of Singapore Press
- Harvey, D. 2014. Seventeen contradictions and the end of capitalism. London: Profile Books
- Hariyanto, V Heru. 2001. Motivasi dan Kesehatan Mental. *Jurnal Anemia*, Surabaya.
- IDEP, 2007. Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Edisi



ke-2. Yayasan IDEP, Bali.

- Kartono, Kartini, 1980. Pemimpin dan Kepemimpinan. PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Ligal, S, 2008. Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir. Jurnal. Dinamika Teknik Sipil Volume 8. Jakarta.
- Malo, Manase dan Sri Trisnoningias, 1999. Metode Penelitian Masyarakat. PAU-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- Miles, Mathew. B. & Huberman, 2001. Qualitatif data Analysis “terj. Rohendi Tjetjep, Analisis data Kualitatif. UI Pers, Jakarta.
- Mistra, 2007. Antisipasi Rumah di Daerah Rawan Banjir. Penebar Swadaya, Depok
- Moleong, Lexy J, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rosda karya, Bandung.
- Manocha, N., & Babovic, V. (2016). Planning flood risk infrastructure development under climate change uncertainty. *Procedia Engineering*, 154, 1406-1413.
- Mayne, A. (2017) *Slums: The history of a global injustice* London: Reaktion Books
- Nurachman, 2007. Pemulihan Trauma: Panduan Praktis Pemulihan Trauma Akibat Bencana Alam. LPLSP3, Jakarta.
- Pelling, M., & Dill, K. (2008). Disaster politics: from social control to human security. *Environment, Politics and Development Working Paper Series*, 1-24.
- Plottu, E., & Plottu, B. (2007). The concept of Total Economic Value of environment: A reconsideration within a hierarchical rationality. *Ecological economics*, 61(1), 52-61
- Poerwandari, Kristi, 2005. Psikologis Korban Pasca Bencana. Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Kodoatie dan Sjarief, 2009. Pengelolaan Bencana Terpadu. Nuansa Aulia, Bandung.
- Rahayu S, dkk, 2009. Monitoring Air Di Daerah Aliran Sungai. World Agroforestry Centre-Southeast Asia Regional Office. Indonesia, Bogor.
- Rohmat, Dede, 2009. Tipikal Kuantitas Infiltrasi Menurut Karakteristik Lahan. Bandung

Saru, Arifin, 2008. Studi model kebijakan mitigasi difabel korban bencana alam (studi kasus di kabupaten bentu). Yogyakarta.

Soeladi, 2006. Manajemen Bencana Alam Tsunami. Sekretariat Bakornas, Jakarta.

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Rafia Aditama, Bandung.

Sugiyono, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung. , 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.

Swyngedouw, E., & Heynen, N. C. (2003). Urban political ecology, justice and the politics of scale. *Antipode*, 35(5), 898-918

Warto, 2010. Ujicoba Pola Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Alam pada Era Otonomi Daerah. Jakarta

**Internet :**

Ade Irawan (2019). Korupsi Bencana, Bencana Korupsi. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-bencana-bencana-korupsi>

Aminudin, M. (20 September 2022). Dampak Hujan di Kota Malang: Jalanan Banjir Hingga Mobil Hanyut. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4337273/dampak-hujan-di-kota-malang-jalanan-banjir-hingga-mobil-hanyut>

Arifin, Z. (16 Maret 2022). Alih Fungsi Sempadan Sungai dan Potensi Banjir Besar Berulang di Kota Malang. <https://surabaya.liputan6.com/read/4912290/alih-fungsi-sempadan-sungai-dan-potensi-banjir-besar-berulang-di-kota-malang>

Arifin, Z. (16 Maret 2022). Dampak Banjir di Kota Malang, Mobil Hanyut dan Puluhan Rumah Terendam. <https://surabaya.liputan6.com/read/4912245/dampak-banjir-di-kota-malang-mobil-hanyut-dan-puluhan-rumah-terendam>

Arifin, Z. (28 Januari 2022). Pemkot Malang Siapkan Rp 46,8 Miliar untuk Proyek Drainase, Bisa Kurangi Banjir?. <https://surabaya.liputan6.com/read/4871733/pemkot-malang-siapkan-rp-468-miliar-untuk-proyek-drainase-bisa-kurangi-banjir>

Banjir Menahun, Pemkot Malang Baru Bikin Masterplan Penanganan 2022. (4 November 2022). <https://radarmalang.jawapos.com/malang-roya/kota-malang/04/11/2021/banjir-menahun-pemkot-malang-baru-bikin-masterplan-penanganan-2022/>

BPBD Kota Malang Perkirakan Jumlah Bencana Semakin Meningkat. (12

Desember 2018). Diakses pada 5 April 2022 dari <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bpbd-kota-malang-perkiraan-jumlah-bencana-semakin-meningkat>

Climate Disasters Are Increasingly Interconnected. (8 September 2021). Diakses pada 5 April 2022 dari <https://unfccc.int/news/climate-disasters-are-increasingly-interconnected>

Edgar, R. (15 Maret 2022). Banjir di Malang, Anggi Bersama Istri dan Anak Terpaksa Bertahan 3 Jam di Atas Kanopi. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/03/15/banjir-di-malang-anggi-bersama-istri-dan-anak-terpaksa-bertahan-3-jam-di-atas-kanopi>

Febrianto, V. (18 Maret 2022). 18 Titik di Kota Malang banjir akibat hujan deras dan angin kencang. <https://www.antaraneews.com/berita/2768897/18-titik-di-kota-malang-banjir-akibat-hujan-deras-dan-angin-kencang>

Hatmoko, J. U. D., Setiadji, B. H. and Wibowo, M. A. (2018) “EVALUASI PENGARUH BANJIR, BEBAN BERLEBIH DAN MUTU KONSTRUKSI PADA KONDISI JALAN”, Prosiding Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi. <https://ojs.fstpt.info/index.php/ProsFSTPT/article/view/160> (diakses pada 6 Juli 2022)

Hury. (25 Mei 2022). Sidak Apartemen Begawan, Komisi C DPRD Kota Malang Temukan Indikasi Pelanggaran Amdal. [https://www.investigasinews.co/2021/05/sidak-apartemen-begawan-komisi-c-dprd.html?utm\\_source=feedburner&utm\\_medium=feed&utm\\_campaign=Feed:+Investigasinewsco+\(Investigasinews.co\)](https://www.investigasinews.co/2021/05/sidak-apartemen-begawan-komisi-c-dprd.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+Investigasinewsco+(Investigasinews.co))

Irawati, D. (5 November 2022). Imbas Banjir, Aliran Air Bersih dari PDAM Kota Malang Terputus. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/05/imbasa-banjir-aliran-air-bersih-dari-pdam-kota-malang-terputus>

Jumlah Bencana Menurut Jenis Bencana dan Kecamatan di Kota Malang 2018-2020. Diakses pada 5 April 2022 dari <https://malangkota.bps.go.id/indicator/152/464/1/jumlah-bencana-menurut-jenis-bencana-dan-kecamatan-di-kota-malang.html>

Kota Malang Berusia 108, MCC dan Penanganan Banjir Jadi Proyek Superioritas. (1 April 2022). <https://radarmalang.jawapos.com/malang-roya/kota-malang/01/04/2022/kota-malang-berusia-108-mcc-dan-penanganan-banjir-jadi-proyek-superprioritas/>

Malang Corruption Watch, “Vonis 7 Tahun Eddy Rumpoko: Ihwal yang Luput dari

Perhatian Jaksa & Majelis Hakim” <https://mcw-malang.org/vonis-7-tahun-eddy-rumpoko-ihwal-yang-luput-dari-perhatian-jaksa-majelis-hakim/>  
(diakses pada 6 Juli 2022)

Midaada, A. (23 Maret 2022). Banjir Terjang Kota Malang usai Diguyur Hujan Deras 3 Jam Lebih. <https://jatim.inews.id/berita/banjir-terjang-kota-malang-usai-diguyur-hujan-deras-3-jam-lebih>

Pantesan Kota Malang Sering Banjir! Ada 287 Km Saluran Drainase Tak Fungsi. (26 Februari 2022). <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raja/kota-malang/26/02/2022/pantesan-kota-malang-sering-banjir-ada-287-km-saluran-drainase-tak-fungsi/>

Peraturan Daerahna, N. (15 Maret 2022). Dampak Banjir di Malang, Warga Kesulitan Air Bersih. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/03/15/205138478/dampak-banjir-di-malang-warga-kesulitan-air-bersih>

Plengsengan Sepanjang 25 Longsor, Dua Rumah Warga Muharto Terancam Ambrol. Diakses pada 4 April 2022 dari <https://indonewsdaily.com/plengsengan-sepanjang-25-longsor-dua-rumah-warga-muharto-terancam-ambrol>.

Ratusan Warga Kota Malang Mengungsi Terdampak Banjir Bandang. (6 November 2021). <https://republika.co.id/berita/r23p11330/ratusan-warga-kota-malang-mengungsi-terdampak-banjir-bandang>

Saputra, A. (9 April 2022). Malang Dilanda Banjir, Warga Herang Bertanya-tanya, Penginnya Begini. <https://jatim.jpnn.com/jatim-terkini/13313/malang-dilanda-banjir-warga-heran-bertanya-tanya-penginnya-begini?page=2>

Urgen Normalisasi Drainase di Kota Malang. (22 Oktober 2021). <https://newmalangpos.id/urgan-normalisasi-drainase-di-kota-malang>

Warga Malang Kesulitan Air Bersih Akibat Banjir. (15 Maret 2022). <https://kumparan.com/tugumalang/warga-malang-kesulitan-air-bersih-akibat-banjir-1xgpSsvtaaf>

Widianto, E. Malang Kota Genangan. (8 April 2022) <https://sorot.terakota.id/malang-kota-genangan>

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja





Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Malang

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Kota

Berita Acara Pertemuan Lintas Sektor Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Nomor 56.I/BA-200.13.PB.01/XII/2021

